

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokus Penelitian

4.1.1 Profil KPU Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

KPU Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum, memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang 'Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,

- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat beritanya,
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- c. Menetapkan peserta pemilu,
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,

- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan, dan
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4. 1 Gedung KPU RI

(20 Mei 2024, 12.46 WIB)

(Sumber: <https://www.KPU.go.id/>. Diakses 2 juli 2024)

4.1.2 Sejarah KPU

Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU atau Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada selain dari pemilihan Presiden dan Legislatif yang berskala Nasional. Pemilihan Umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Tetapi, sejarah pembentukan Lembaga pelaksanaan Pemilu sudah ada sejak tahun 1946.

Presiden pertama di Indonesia, Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1946 mengenai Pembaruan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

1. Panitia Pemilihan Indonesia
Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang

pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953. Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin, dan melaksanakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstitusi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstitusi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibu kota negara. Tapi pemilu pertama tidak dilanjutkan dengan Pemilu Kedua. Pada tahun 1958 Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

2. Lembaga Pemilihan Umum
Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LPU) pada masa pemerintahan orde baru. Terbentuknya LPU berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Yang bertindak sebagai ketua LPU yaitu Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Perimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Pembekalan dan Perhubungan. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sekaligus mengakhiri periode orde baru. Lalu digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) sebagai Presiden selanjutnya.

4.1.3 Dasar Hukum

UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

4.1.4 Sistem Pemilu

1. Ada 3 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak.
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

4.1.5 Badan Penyelenggara Pemilu

Organisasi penyelenggara mulai dari pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,

PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

4.1.6 Pelaksanaan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden secara serempak, atau lebih lazim dikenal dengan istilah “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak”, membuat skala penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi luar biasa besar. Pemilu 2019, adalah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 2019 juga merupakan pemilu satu hari terbesar di dunia.

Predikat itu masih bertambah, karena Pemilu 2019 juga merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Betapa tidak, ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Pemilu serentak lima kotak diselenggarakan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dbacakan pada 23 Januari 2014 tersebut, MK menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pemilu presiden) setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

4.1.7 Alamat Kantor KPU RI

Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

4.1.8 Struktur Organisasi Anggota KPU RI

Ketua: Mochamad Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Anggota: Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz

a. Susunan Penanggung Jawab Divisi

1. Yulianto Sudrajat (Ketua) dan Parsadaan Harahap (Wakil Ketua) pada Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.

2. August Mellaz (Ketua) dan Betty Epsilon Idroos (Wakil Ketua) pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
 3. Betty Epsilon Idroos (Ketua) dan Mochammad Afifuddin (Wakil Ketua) pada Divisi Data dan Informasi
 4. Parsadaan Harahap (Ketua) dan Yulianto Sudrajat (Wakil Ketua) pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan.
 5. Idham Holik (Ketua) dan August Mellaz (Wakil Ketua) pada Divisi Teknis Penyelenggaraan.
 6. Mochammad Afifuddin (Ketua) dan Idham Holik (Wakil Ketua) pada Divisi Hukum dan Pengawasan.
- b. Susunan Koordinator Wilayah
1. Parsadaan Harahap (Ketua) dan Yulianto Sudrajat (Wakil Ketua) pada Koordinator Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sulawesi Tenggara.
 2. Yulianto Sudrajat (Ketua) dan Betty Epsilon Idroos (Wakil Ketua) pada Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Bali, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara
 3. Mochammad Afifuddin (Ketua) dan August Mellaz (Wakil Ketua) pada Koordinator Wilayah Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
 4. Betty Epsilon Idroos (Ketua) dan Idham Holik (Wakil Ketua) pada Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan D.I. Yogyakarta.
 5. Idham Holik (Ketua) dan Parsadaan Harahap (Wakil Ketua) pada Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Barat, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan dan Papua Barat Daya.
 7. August Mellaz (Ketua) dan Mochammad Afifuddin (Wakil Ketua) pada Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jambi dan Riau.

4.1.10 Visi dan Misi

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan dan pencapaian masing-masing yang membuat perusahaan terus berjalan dan berkembang. Oleh karena itu KPU RI juga memiliki Visi dan Misi antara lain, yaitu :

a. VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

b. MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

4.2 Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini adalah berbentuk data dan informasi mengenai Strategi humas KPU RI dalam membangun partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024. Proses pengumpulan informasi atau data dari penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam pada informan yang telah peneliti tentukan, peneliti menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan informan berdasarkan kemampuan dan mengetahui informasi seputar penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor KPU RI yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Maka penelitian ini membahas

berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya pada kutipan wawancara yang didapat selama penelitian berlangsung.

Data yang diperoleh saat dilakukannya penelitian ini berupa wawancara dengan key informan, yaitu

- 1) Reni Rinjani (Kepala bagian humas dan informasi publik, setjen KPU RI) sebagai *key informan*.
- 2) Heni Lestari (Anggota KPU Kota Tangerang Selatan divisi SDM dan partisipasi Masyarakat) sebagai Informan I
- 3) Turangga raflihuda (Mahasiswa STMKG) Informan II
- 4) Diva emiria mabel (Santri Pesantren jagat arsy) informan III
- 5) Aji Pangestu (Kordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat Kota Tangerang Selatan) sebagai triangulasi sumber 1

Pada penelitian ini berfokus pada “Kampanye Humas KPU RI Melalui Film Kejarlah Janji pada Pemilih Pemula di Kota Tangerang Selatan”. Berikut akan diinterpretasikan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

4.3 Hasil Penelitian

1. Kampanye Humas

a. Awareness

Pembahasan pada tahap pertama ini dikaji dengan menggunakan pendekatan proses *Public Relations* yang dikemukakan oleh Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom. Proses *Public Relations* yang dikemukakan oleh Cutlip, Center, dan Broom yang pertama adalah *awareness* yang dimulai dengan melakukan penilaian tentang adanya sesuatu yang salah atau sesuatu yang seharusnya berjalan dengan lebih baik. Dalam hal terkandung gagasan bahwa tujuan organisasi adalah menyediakan kriteria untuk penilaian tersebut. Pada tahap ini *awareness* mencakup pengkajian dan pemantauan opini, sikap dan perilaku yang terkait dengan

Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman, Penelitian ini menunjukkan bahwa film "Kejarlah Janji" berhasil meningkatkan pengetahuan pemilih pemula tentang pemilu. Sebagian besar partisipan yang menonton film ini mengaku mendapatkan informasi baru tentang pentingnya hak pilih mereka, proses pemilu, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Film ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami bagi

pemilih pemula, terutama dalam menjelaskan prosedur pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi.

Variasi Tingkat Pemahaman, Meskipun secara umum pengetahuan meningkat, ada perbedaan dalam tingkat pemahaman antara partisipan. Pemilih pemula yang sebelumnya kurang terpapar pada informasi politik menunjukkan peningkatan pengetahuan yang lebih signifikan, sementara mereka yang sudah memiliki pemahaman dasar tentang pemilu merasa bahwa film ini lebih memperkuat pengetahuan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Reni Rinjani selaku Kepala bagian humas dan informasi publik, setjen KPU RI ia menjelaskan pentingnya Kampanye Humas KPU RI Melalui Film Kejarlal Janji pada Pemilih Pemula di Kota Tangerang Selatan.

“ Penting sekali sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, Selain itu adalah untuk mengajak masyarakat, mau berpartisipasi aktif atau ber ikut serta megambil perannya dalam pemilu di 2024, peran yang di maksud itu apa? masyarakat itu punya hak pilih, hak pilih adalah hak dalam memilih dan di pilih, hak untuk memilih sebagai warga negara penting sekali kpu memberikan kabar atau informasi tentang tahapan pemilu agar masyarakat tahu kapan masyarakat mengambil perannya. Sosialisasi pemilu memastikan bahwa pemilih memahami prosedur pemungutan suara, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara memastikan suara mereka dihitung dengan benar (hasil wawancara 7/06/2024)”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Heni Lestari selaku Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“ Pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih sangat penting pastinya untuk masyarakat terutama pemilih pemula, karena pemilih pemula adalah pemilih yang baru saja memilih, Pendidikan pemilih membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan peran mereka dalam proses demokrasi. jadi kpu pastinya memberikan pendidikan pemilih untuk masyarakat agar berperan aktif dalam pemilu, Dengan memberikan informasi yang jelas dan mendidik pemilih, KPU dapat mengurangi tingkat golput, terutama di kalangan pemilih pemula yang mungkin kurang memahami pentingnya pemilu (hasil wawancara 15/06/2024)”.

Dengan demikian, anggota KPU memandang pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu sebagai elemen krusial dalam memastikan pemilu yang bebas, adil, dan partisipatif.

b. Attitude

Attitude terdiri atas tiga substansi, yakni *Target Publics*, *Objective*, dan Proses Perencanaan dan Pemrograman. *Target Publics* menjabarkan bahwa masyarakat umum sebagai target dari menetapkan tujuan sangat penting agar program yang direncanakan memiliki arah dan dapat menunjukkan suatu keberhasilan tertentu.

Dalam program Strategi humas KPU RI tujuan yang ingin dicapai melalui film kejarlah janji ini adalah meningkatkan partisipasi Masyarakat dan Pendidikan politik untuk pemilih pemula.

Perubahan Sikap terhadap Pemilu, film ini berpengaruh pada perubahan sikap pemilih pemula terhadap pemilu. Banyak dari mereka yang awalnya merasa pemilu tidak relevan atau menganggapnya kurang penting menjadi lebih peduli dan sadar akan peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa setelah menonton film, mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk menggunakan hak pilih mereka.

Motivasi untuk Terlibat Film ini juga berhasil memotivasi pemilih pemula untuk lebih terlibat dalam proses pemilu, meskipun masih terdapat sebagian kecil partisipan yang tetap bersikap skeptis atau apatis. Sikap apatis ini sering kali terkait dengan pandangan negatif mereka terhadap politik secara umum atau pengalaman keluarga yang tidak mempercayai sistem politik.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dapat di ketahui menurut KPU RI, ada beberapa program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 meliputi:

“ Program pendidikan pemilih, terutama untuk pemilih pemula, dilaksanakan melalui seminar, workshop, dan kegiatan edukatif lainnya di sekolah dan universitas, serta melalui komunitas lokal. Selain itu KPU RI memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi pemilu secara lebih luas dan cepat. Aplikasi dan situs web resmi KPU menyediakan informasi penting mengenai proses pemilu, tata cara pemungutan suara, dan daftar calon, dan salah satu program KPU mendukung pembuatan film, video pendek, dan materi kreatif lainnya yang mengangkat tema pemilu dan pentingnya partisipasi politik, seperti film “Kejarlah Janji “ (hasil wawancara 7/06/2024)”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Heni Lestari selaku Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“ KPU Tangsel mengadakan simulasi pemilu di berbagai kecamatan di tangsel, kalau kemarin di kecamatan pamulang berada di kelurahan pamulang barat, untuk memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai proses pemungutan suara, sehingga mereka lebih siap dan yakin dalam berpartisipasi. KPU RI bekerja sama dengan influencer, tokoh masyarakat, dan selebriti untuk mengkampanyekan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, sehingga pesan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Kpu pun juga mendukung film kejarlah janji yang diselenggarakan KPU RI untuk nobar bersama santri dan di perguruan tinggi, tangsel mendapat dua sekolah yaitu di STMKG dan Pesantren Jagat Arsy untuk menyelenggarakan nobar film kejarlah janji (hasil wawancara 7/06/2024)”.

Perilaku KPU RI Menyediakan film "Kejarlah Janji" yang sudah diproduksi untuk ditayangkan di berbagai platform dan acara. Menyebarluaskan film melalui bioskop lokal, sekolah, universitas, dan platform streaming online yang populer di kalangan pemilih muda.

Mengadakan acara nonton bareng (nobar) film di tempat-tempat strategis seperti sekolah, kampus, dan komunitas pemuda, diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan narasumber dari KPU dan tokoh masyarakat. Membuat kampanye digital yang menyertakan cuplikan film, pesan-pesan edukatif, dan ajakan untuk menonton film serta berpartisipasi dalam pemilu, dengan melibatkan influencer dan tokoh muda lokal. Dengan pendekatan yang terencana dan program yang terstruktur, strategi humas KPU RI melalui film "Kejarlah Janji" diharapkan efektif dalam mensosialisasikan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Tangerang Selatan.

c. *Behaviorial*

Behaviorial terdiri atas tiga substansi, yaitu *action strategies*, *communication strategies*, dan *program implementation plans*. Dalam *action strategies*, adalah pelaksanaan secara teknis apa saja yang dilakukan oleh Strategi Humas KPU RI dalam mensosialisasikan pemilih pemula melalui film kejarlah janji di kota Tangerang

Niat untuk Berpartisipasi dalam Pemilu, penelitian menemukan bahwa setelah menonton film, banyak pemilih pemula menunjukkan niat yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang. Mereka merasa lebih yakin untuk hadir di tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih mereka. Beberapa partisipan

bahkan mulai berdiskusi dengan teman-teman dan keluarga mereka tentang pentingnya memilih.

Tindakan Konkret yang Masih Terbatas, meskipun niat untuk berpartisipasi meningkat, tindakan konkret yang diambil oleh pemilih pemula setelah menonton film masih terbatas. Sebagian besar partisipan belum mengambil langkah lebih jauh, seperti mencari informasi tambahan tentang calon yang akan dipilih atau berpartisipasi dalam kegiatan terkait pemilu. Faktor-faktor seperti kurangnya akses informasi atau minimnya dorongan dari lingkungan sekitar dapat menjadi alasan kurangnya tindakan nyata ini.

“Pemilihan dan Lokasi penayangan film kejarlah janji dengan mengidentifikasi dan memilih lokasi-lokasi strategis seperti sekolah, universitas, pusat komunitas, dan bioskop lokal yang sering dikunjungi oleh pemilih pemula. Mengatur jadwal penayangan di berbagai lokasi tersebut untuk menjangkau sebanyak mungkin pemilih pemula. Menyebarkan cuplikan film dan pesan-pesan edukatif melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Menggunakan hashtag khusus untuk meningkatkan interaksi dan diskusi online tentang film dan pemilu (hasil wawancara 15/06/2024)”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Heni Lestari selaku Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“Menyediakan materi edukasi tambahan seperti brosur, pamflet, dan booklet yang berisi informasi tentang pemilu, cara memilih, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Membagikan materi tersebut kepada penonton film dan menyediakan informasi kontak untuk pertanyaan lebih lanjut. Mengundang narasumber yang berkompeten untuk memberikan materi dan menjawab pertanyaan peserta mengenai pemilu dan politik. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan organisasi pemuda untuk memastikan dukungan logistik dan penyebaran informasi yang lebih luas. Mengajak organisasi lokal untuk berpartisipasi dalam acara dan membantu menyebarkan informasi (hasil wawancara 7/06/2024) ”.

Langkah-langkah teknis ini, KPU RI melalui strategi humasnya dapat lebih efektif dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu kepada pemilih pemula di Kota Tangerang melalui film "Kejarlah Janji".

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dapat di ketahui menurut KPU RI, apa target yang ingin dicapai yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu 2024 meliputi:

“ Meningkatkan kesadaran politik Masyarakat dengan cara Meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan proses demokrasi. Menyadarkan pemilih pemula akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam memilih pemimpin. Mendorong lebih banyak pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga mengurangi tingkat golput. Meningkatkan jumlah pemilih pemula yang terdaftar dan aktif memberikan suara pada hari pemilu. Memberikan pemahaman yang jelas tentang tata cara pemungutan suara, dari pendaftaran hingga pelaksanaan di TPS. Mengajarkan pentingnya menjaga integritas suara dan proses pemilu yang jujur dan adil (hasil wawancara 15/06/2024) ”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Heni Lestari selaku Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, yaitu :

” Pastinya target kita semua lapisan masyarakat yaa, dengan menggunakan media film untuk menarik minat pemilih muda dan membuat topik politik dan pemilu lebih menarik dan relevan bagi mereka. Menggunakan narasi dan karakter dalam film untuk menginspirasi pemilih pemula agar merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi. mendorong diskusi dan refleksi di kalangan pemilih pemula mengenai isu-isu politik dan pemilu melalui sesi tanya jawab dan diskusi setelah penayangan film. Melibatkan pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi lanjutan seperti workshop, seminar, dan kegiatan komunitas yang terkait dengan pemilu. Memaksimalkan penggunaan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarluaskan pesan-pesan penting tentang pemilu dan meningkatkan jangkauan sosialisasi (hasil wawancara 7/06/2024) ”.

Dengan target-target ini, KPU RI berharap dapat menciptakan generasi pemilih yang lebih sadar, terdidik, dan aktif dalam proses pemilu, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pelaksanaan pemilu yang lebih sukses dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI) atas Rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Nonton Film Bareng Serentak oleh Mahasiswa Terbanyak, dan Pemrakarsa dan Penyelenggara Nonton Film Bareng Serentak oleh Santri Terbanyak.



Gambar 4. 4 KPU RI meraih Rekor Muri

Sumber : Instagram KPU RI (diakses pada 2 juli 2024, 12.44)

https://www.instagram.com/kpu_ri?igsh=MXEza2I2NWxhc2Q1eg==

Piagam penghargaan MURI tersebut diterima langsung Ketua KPU, Hasyim Asya’ri dari perwakilan MURI, Sri Widyati. Nonton film bareng “Kejarlah Janji” serentak oleh santri dan mahasiswa terbanyak resmi tercatat di Museum Rekor Dunia-Indonesia sebagai rekor yang ke-11.348 dan 11.349.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dapat di ketahui menurut KPU RI, startegi humas KPU RI berhasil dalam mensosialisasikan pemilih pemula melalui film kejarlah janji di pemilu 2024 meliputi:

“ Menurut MURI, nonton bareng film “Kejarlah Janji” serentak yang diselenggarakan oleh KPU adalah kegiatan spektakuler. Tahap pertama nonton bareng telah dilaksanakan bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2023 di 38 provinsi dan 460 pesantren serta ditonton kurang lebih oleh 119.767 santri. Kemudian hari ini, 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, nonton bareng dilaksanakan serentak di 36 provinsi dan 435 perguruan tinggi serta ditonton kurang lebih 216.765 mahasiswa (hasil wawancara 15/06/2024)”.

Tabel 4. 1 Rekor Muri

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Nonton Film Bareng Serentak oleh Santri Terbanyak | 38 Provinsi, 119.767 Santri |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 2. | Nonton Film Bareng Serentak oleh Mahasiswa Terbanyak | 36 Provinsi, 216.765 Mahasiswa |
|----|--|--------------------------------|

Sumber : [sumber narasumber kpu ri.](#)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Heni Lestari selaku Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, yaitu :

“ Yaaa berhasil, Startegi Humas KPU berhasil mensosialisasikan pemilih pemula melalui film kejarlah janji, dengan mengevaluasi perubahan dalam sikap dan kepedulian pemilih pemula terhadap isu-isu politik setelah menonton film. Pemilih pemula setelah menonton alhamdulillah banyak yang sadar akan kesadaran dalam peran nya untuk memilih (hasil wawancara 15/06/2024)”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari mahasiswa STMKG yaitu :

“ Film ini sih rekomen yang untuk di tonton , karena tentunya dalam film ini banyak ajakan kita sebagai pemilih untuk menggunakan hak suara kita, bahwa pemilu itu asik dan menyenangkan. Lalu ada pesan juga untuk tidak ikut terlibat dalam money politik, black campaign. Tentu pesan-pesan yang disampaikan tersebut sangat bagus untuk pengetahuan demokrasi bagi para pemilih pemula (hasil wawancara 24 /06/2024)”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Santri Jagat Arsy yaitu :

“ Film tersebut dapat memberikan dampak positif kepada pemilih pemula dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan bagaimana peran mereka dapat mempengaruhi masa depan bangsa (hasil wawancara 24/06/2024)”.

Film "Kejarlah Janji" berhasil menarik perhatian dan minat ribuan pemilih pemula di berbagai lokasi penayangan. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pemilih pemula yang mendaftar dan berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Melalui pesan-pesan edukatif yang disampaikan dalam film, banyak pemilih pemula yang melaporkan peningkatan pemahaman mereka tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi. Survei yang dilakukan sebelum dan sesudah penayangan film menunjukkan peningkatan pengetahuan yang substansial di kalangan audiens.

Acara penayangan film di berbagai lokasi disertai dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan pemilih pemula, narasumber, dan perwakilan KPU. Respons dan

keterlibatan audiens sangat positif, dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi tentang isu-isu pemilu.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara KPU RI dengan berbagai institusi pendidikan, komunitas lokal, dan media. Kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif. KPU menerima banyak testimoni dan cerita sukses dari pemilih pemula yang merasa terinspirasi dan termotivasi setelah menonton film. Banyak dari mereka yang sebelumnya apatis kini merasa bersemangat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memberikan suara mereka.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi humas KPU RI melalui film *Kejarlah Janji* telah berhasil mencapai tujuan utama KPU meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi.

4.4 Hasil Pembahasan

4.4.1 Awareness

Menurut Pfau dan Parrot (1993) kampanye *public relations* bertujuan untuk mencapai tiga aspek utama. Pertama, aspek pengetahuan (*knowledge/awareness*) yang berfokus pada meningkatkan kesadaran dan pemahaman audiens tentang isu atau topik tertentu. Kedua, aspek sikap (*attitude*) yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sikap atau persepsi audiens terhadap topik yang dikampanyekan. Ketiga, aspek perilaku (*behavioral*) yang berusaha untuk mendorong perubahan dalam tindakan atau perilaku audiens sebagai hasil dari kampanye (Venus, 2019:14)

Kampanye Humas menentukan tujuan yang hendak di capai yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam semua tahapan Pemilu ini. Seperti hasil dari wawancara dengan Kepala Bagian Humas KPU RI dapat disimpulkan bahwa tujuan KPU RI dalam kampanye pemilih pemula melalui film *Kejarlah Janji* adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Pemilu 2024. Dengan di adakannya kampanye humas dalam mensosialisasikan pemilih pemula melalui film *Kejarlah Janji*, diharapkan adanya perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya kurang sadar untuk berpartisipasi dalam tahapan Pemilu menjadi sadar dan ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu 2024.

Peningkatan Pengetahuan Pemilih Pemula Film "*Kejarlah Janji*" berhasil menjadi media edukasi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan pemilih pemula tentang

pemilu. Sebagian besar partisipan penelitian melaporkan bahwa mereka mendapatkan informasi baru dan penting mengenai prosedur pemilihan, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye humas melalui media film mampu menjangkau dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kelompok pemilih pemula yang sebelumnya mungkin kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu.

Pemahaman yang beragam, meskipun secara umum terjadi peningkatan pengetahuan, terdapat variasi dalam tingkat pemahaman antara partisipan. Pemilih pemula dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang pemilu cenderung lebih mudah mengasimilasi informasi yang disampaikan dalam film. Di sisi lain, partisipan dengan akses informasi yang lebih terbatas atau yang kurang familiar dengan isu-isu politik sebelumnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih signifikan, meskipun membutuhkan penjelasan lebih lanjut.



**Gambar 4. 5 Penyerahan Cenderamata Nobar Film
kejarlah janji di Pesantren Jagat Arsy**

Sumber : kpu kota Tangerang Selatan, Rabu 10 juli 2024



Gambar 4. 6 Penyerahan Cenderamata Nobar Film kejarlah janji di STMKG

Sumber : kpu kota Tangerang Selatan, Rabu 10 juli 2024



Gambar 4. 7 Sosialisasi pemilih pemula di SMA Global Islamic School

Sumber : kpu kota Tangerang Selatan, Rabu 31 juli 2024

Kampanye Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui film "Kejarlah Janji" pada pemilih pemula di Kota Tangerang Selatan merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam proses demokrasi. Film ini dipilih karena mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan pemilih pemula, yang sering kali menjadi kunci untuk membangkitkan minat mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Pertama-tama, KPU RI memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk menyebarkan informasi tentang film "Kejarlah Janji". Melalui kampanye digital yang intensif, KPU mempromosikan trailer, cuplikan menarik, dan dialog-dialog penting dari film

ini. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian generasi muda yang aktif menggunakan media sosial sebagai saluran informasi utama mereka.



Gambar 4. 8 Media Informasi Instagram

Sumber : Instagram KPU kota Tangerang Selatan dan KPU RI

Selain itu, KPU RI mengadakan serangkaian acara pemutaran khusus film ini di berbagai kota besar di Indonesia. Acara ini tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga forum diskusi yang mempertemukan pemilih pemula dengan tokoh-tokoh publik, akademisi, dan aktivis sosial untuk berbicara tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, KPU juga melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan "Kejarlah Janji" ke dalam kurikulum pendidikan

kewarganegaraan. Dengan memasukkan film ini sebagai bahan ajar, KPU berharap dapat meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya hak suara dan tanggung jawab sebagai warga negara. KPU RI melibatkan influencer dan tokoh masyarakat yang populer di kalangan pemilih pemula untuk mendukung kampanye sosialisasi ini. Kolaborasi dengan mereka membantu menciptakan kesan positif di media sosial dan meningkatkan jangkauan pesan-pesan penting yang disampaikan melalui film "Kejarlah Janji".

Secara keseluruhan, Kampanye humas KPU RI melalui film "Kejarlah Janji" pada pemilih pemula di kota Tangerang Selatan berhasil memanfaatkan media digital, acara fisik, pendidikan formal, dan dukungan dari tokoh masyarakat untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya partisipasi politik di kalangan generasi muda Indonesia.

Kampanye pemilu dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU RI sangat penting dalam memastikan terlaksananya pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kegiatan ini begitu penting:

1. Meningkatkan Partisipasi Pemilih :

- a. Kesadaran dan Pemahaman : Sosialisasi pemilu membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak suara mereka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, yang merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat.
- b. Mengatasi Apatisme : Dengan memberikan informasi yang jelas dan relevan, sosialisasi dapat membantu mengatasi apatisme politik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula.



Gambar 4.9 menjalankan posko keliling untuk pindah memilih

Sumber : intagram KPU kota Tangerang Selatan

2. Meningkatkan Kualitas Pemilihan :

- a. Pemilih yang Terinformasi : Pendidikan politik memastikan bahwa pemilih memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak dan berdasarkan fakta. Ini dapat meningkatkan kualitas hasil pemilu, karena pemilih dapat memilih calon yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
- b. Mengurangi Misinformasi : Sosialisasi yang efektif dapat mengurangi penyebaran misinformasi dan disinformasi, yang dapat merusak integritas pemilu.



Gambar 4. 9 Sosialisasi pemilu 2024

Sumber : intagram KPU Kota Tangerang Selatan

3. Memastikan Keadilan dan Transparansi :

- a. Proses yang Transparan : Pendidikan tentang proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dapat meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
- b. Pengawasan oleh Publik : Dengan memahami proses pemilu, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan jika terjadi pelanggaran.

4. Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi :

- a. Pemahaman tentang Demokrasi : Pendidikan politik membantu masyarakat memahami dan menghargai nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia.
- b. Peningkatan Keterlibatan Warga : Sosialisasi dan pendidikan politik mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik tidak hanya selama pemilu tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mengatasi Hambatan dan Tantangan :

- a. Menghadapi Tantangan Sosial dan Budaya : Sosialisasi pemilu dapat membantu mengatasi hambatan sosial dan budaya yang mungkin menghalangi partisipasi kelompok tertentu, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas.
- b. Mengidentifikasi dan Mengatasi Masalah : Melalui pendidikan dan dialog, KPU dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemilih dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan partisipasi.

6. Membentuk Generasi Pemilih yang Bertanggung Jawab :

- a. Edukasi Pemilih pemula : Pendidikan politik yang ditargetkan pada pemilih pemula membantu membentuk generasi pemilih yang bertanggung jawab dan sadar akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi.
- b. Pembentukan Kebiasaan Partisipasi : Dengan mengedukasi pemilih sejak dini, diharapkan mereka akan terus aktif berpartisipasi dalam pemilu dan proses politik sepanjang hidup mereka.

Implementasi Strategis Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Untuk memastikan sosialisasi dan pendidikan politik berjalan efektif, KPU RI dapat menerapkan beberapa strategi berikut:

- a. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan : Mengintegrasikan pendidikan pemilu dalam kurikulum sekolah dan universitas.
- b. Penggunaan Media Sosial dan Digital : Memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi digital untuk menjangkau pemilih muda dan masyarakat luas.
- c. Pelatihan dan Workshop : Mengadakan pelatihan dan workshop bagi pemilih serta penyelenggara pemilu di berbagai daerah.

- d. Materi Edukasi Kreatif : Mengembangkan materi edukasi yang kreatif dan menarik, seperti video, infografis, dan permainan interaktif.
- e. Kolaborasi dengan Influencer : Bekerjasama dengan influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar untuk menyebarkan pesan-pesan penting tentang pemilu.
- f. Simulasi Pemilu : Mengadakan simulasi pemilu di sekolah-sekolah atau komunitas untuk memberikan pengalaman praktis kepada pemilih pemula.

Dengan menerapkan kampanye ini, KPU RI dapat memastikan bahwa kampanye pemilu dan pendidikan politik berjalan dengan baik, mencapai sasaran yang diinginkan, dan membantu membentuk masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat film "Kejarlah Janji" dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Edukasi Publik : Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, proses pemilihan, dan bagaimana suara mereka dapat mempengaruhi masa depan negara. Film ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik tentang pemilu dan demokrasi.
- b. Meningkatkan Partisipasi Pemilih : Mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan memberikan informasi yang jelas dan menarik tentang pentingnya memberikan suara. KPU ingin meningkatkan tingkat partisipasi pemilih melalui pendekatan yang lebih personal dan inspiratif.
- c. Promosi Nilai-Nilai Demokrasi : Menyampaikan dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif. Film ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Meningkatkan Citra KPU : Memperkuat citra KPU sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan berkomitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan memproduksi film ini, KPU ingin menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Mengatasi Misinformasi dan Disinformasi : Mengurangi dampak misinformasi dan disinformasi terkait pemilu dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat

dipercaya melalui media film. KPU ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai proses pemilu.

- f. Menginspirasi Generasi Muda : Mengajak dan menginspirasi generasi muda untuk lebih terlibat dalam proses politik dan pemilu. KPU berharap film ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi anak muda untuk memahami pentingnya partisipasi politik dan kontribusi mereka dalam demokrasi.
- g. Membangun Kesadaran Sosial : Membangun kesadaran sosial tentang isu-isu penting yang terkait dengan pemilu dan demokrasi, seperti hak pilih, peran warga negara, dan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas.
- h. Media Kampanye Kreatif : Memanfaatkan media film sebagai alat kampanye kreatif yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan pendekatan visual dan naratif yang menarik, pesan-pesan KPU diharapkan dapat lebih efektif tersampaikan kepada audiens yang lebih luas.

Dengan tujuan-tujuan ini, KPU RI berupaya untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif, partisipatif, dan demokratis, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.

KPU RI memilih judul film *Kejarlah Janji* untuk menyampaikan beberapa pesan dan tujuan penting terkait pemilu. Berikut adalah beberapa alasan potensial di balik pemilihan judul tersebut:

1. Makna Simbolis :

- a. Janji dan Harapan: Judul ini menggambarkan konsep janji dan harapan yang seringkali menjadi inti dari kampanye pemilu. Calon pemimpin seringkali membuat janji kepada masyarakat, dan pemilih memiliki harapan agar janji tersebut dapat terpenuhi.
- b. Motivasi dan Dorongan : Kata "kejarlah" mengandung elemen motivasi dan dorongan bagi pemilih untuk aktif terlibat dalam proses pemilu dan mengejar janji-janji perbaikan yang ditawarkan oleh calon pemimpin.

2. Menggugah Emosi :

- a. Inspirasi : Judul ini dirancang untuk menginspirasi dan menggugah emosi penonton, terutama pemilih muda, untuk merasa terlibat dan bersemangat dalam mengejar perubahan positif melalui partisipasi dalam pemilu.

- b. Keterhubungan : Judul yang kuat dan emosional dapat membantu penonton merasa lebih terhubung dengan pesan film dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses demokrasi.

3. Relevansi dengan Isi Film:

- a. Naratif : Judul ini mencerminkan plot atau tema utama dari film, di mana karakter-karakter dalam cerita berusaha untuk mewujudkan janji-janji dan harapan mereka melalui partisipasi aktif dalam pemilu.
- b. Pesan Moral : Film ini berusaha menyampaikan pesan moral bahwa untuk mencapai perubahan dan kemajuan, masyarakat harus aktif dalam mengejar dan memastikan pemenuhan janji-janji yang dibuat oleh calon pemimpin.

4. Kesederhanaan dan Kekuatannya :

- a. Mudah Diingat : Judul yang singkat dan kuat seperti "Kejarlah Janji" mudah diingat dan dapat menarik perhatian penonton dengan segera.
- b. Komunikasi yang Efektif : Judul ini mampu dengan cepat mengkomunikasikan esensi dari film dan pesan yang ingin disampaikan tanpa perlu penjelasan panjang.

5. Mengajak Tindakan:

- a. Aktivasi Pemilih: Judul ini mengandung ajakan langsung kepada pemilih untuk mengambil tindakan, tidak hanya sebagai penerima pasif janji, tetapi sebagai pengejar aktif yang memastikan janji tersebut diwujudkan.
- b. Kesadaran Kritis: Mengajak pemilih untuk lebih kritis dan aktif dalam memantau dan mengevaluasi janji-janji yang dibuat oleh para calon pemimpin.

Dengan judul "Kejarlah Janji", KPU RI berusaha untuk menarik perhatian dan menggugah semangat pemilih, terutama pemilih pemula, untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, memahami pentingnya suara mereka, dan memastikan bahwa janji-janji yang dibuat oleh calon pemimpin tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

4.4.2 Attitude

Perubahan Sikap Terhadap Pemilu, film ini berhasil mengubah sikap sebagian besar pemilih pemula terhadap pemilu. Partisipan yang awalnya kurang tertarik atau merasa

tidak relevan dengan proses pemilu mulai menunjukkan sikap yang lebih positif dan antusias. Mereka merasa bahwa pemilu adalah momen penting yang harus diikuti, dan ada kesadaran baru tentang peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa melalui hak pilih.

Peningkatan Motivasi, motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu juga mengalami peningkatan setelah menonton film ini. Beberapa partisipan mengaku merasa lebih terdorong untuk ikut serta dalam pemilu mendatang. Namun, tetap ada tantangan dalam mengubah sikap apatis di kalangan pemilih pemula yang memiliki pengalaman atau pandangan negatif terhadap sistem politik.

Pada pemilu 2024 KPU RI telah menyelenggarakan berbagai program sosialisasi guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu. Berikut adalah beberapa program yang diselenggarakan:

1. Pendidikan Pemilih di Sekolah dan Kampus :

Pemilu Goes to School : Program ini ditujukan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu dan proses demokrasi.

Pemilu Goes to Campus : Program serupa yang ditujukan untuk mahasiswa, termasuk seminar, diskusi, dan lokakarya tentang politik dan pemilu.

2. Sosialisasi melalui Media Massa:

Iklan Layanan Masyarakat : Penayangan iklan di televisi, radio, dan media cetak untuk menyebarkan informasi penting tentang pemilu.

Program Televisi dan Radio : Acara khusus yang membahas topik pemilu, termasuk talk show, debat kandidat, dan program edukatif lainnya.

3. Kampanye Digital dan Media Sosial :

Kampanye di Media Sosial : Menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan informasi pemilu, tips pemungutan suara, dan mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan masyarakat.

Website dan Aplikasi Mobile : Menyediakan informasi lengkap tentang pemilu, termasuk daftar pemilih, profil kandidat, dan panduan pemungutan suara.

4. Kampanye Tatap Muka dan Kegiatan Lapangan :

Sosialisasi Keliling : Mengadakan kegiatan sosialisasi di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, dengan menggunakan mobil keliling dan posko-posko informasi.

Forum Warga dan Diskusi Kelompok : Mengadakan diskusi terbuka di komunitas lokal untuk membahas isu-isu pemilu dan mendengarkan aspirasi warga.

5. Materi Edukasi dan Informasi :

Brosur, Pamflet, dan Poster : Distribusi materi cetak yang berisi informasi tentang pemilu, prosedur pemungutan suara, dan hak-hak pemilih.

Buku Panduan dan Modul Edukasi : Pengembangan dan distribusi buku panduan dan modul edukasi yang dapat digunakan oleh guru dan fasilitator dalam mengajarkan tentang pemilu.

6. Program Khusus untuk Pemilih Pemula dan Kelompok Marjinal :

Program untuk Pemilih Pemula : Kegiatan khusus yang menargetkan pemilih pemula, termasuk pelatihan dan simulasi pemilu.

Program Inklusif : Sosialisasi yang dirancang khusus untuk kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas, warga di daerah terpencil, dan masyarakat adat, termasuk penyediaan materi dalam berbagai format yang mudah diakses.

7. Pelatihan dan Bimbingan Teknis :

Pelatihan untuk Petugas Pemilu : Pelatihan intensif bagi petugas pemilu di semua tingkatan untuk memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka.

Workshop dan Lokakarya : Kegiatan pelatihan untuk organisasi masyarakat, LSM, dan relawan yang berperan dalam mendukung proses pemilu.

8. Kegiatan Simulasi Pemilu :

Simulasi Proses Pemungutan Suara : Mengadakan simulasi pemilu di sekolah-sekolah dan komunitas untuk memberikan pengalaman langsung kepada pemilih tentang proses pemungutan suara.

Simulasi Penghitungan Suara : Kegiatan yang bertujuan untuk memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan suara.

9. Kolaborasi dengan Organisasi dan Komunitas :

Kemitraan dengan LSM dan Organisasi Masyarakat Sipil : Bekerjasama dengan organisasi lokal dan internasional untuk menyebarkan informasi pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Influencer : Mengajak tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer untuk ikut serta dalam kampanye sosialisasi pemilu.

10. Pemantauan dan Evaluasi :

Survey Kepuasan Pemilih : Melakukan survei untuk mengukur efektivitas program sosialisasi dan memahami kebutuhan pemilih.

Evaluasi Program : Mengadakan evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan program sosialisasi pemilu di masa mendatang.

11. Penggunaan Teknologi Informasi :

Aplikasi e-PPID KPU : Aplikasi yang menyediakan akses informasi terkait pemilu secara cepat dan akurat bagi masyarakat.

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP): Sistem digital untuk membantu proses rekapitulasi suara secara transparan dan efisien.

KPU RI berupaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, dan turut serta dalam proses demokrasi yang adil dan transparan.

4.4.3 Behavioral

Niat Berpartisipasi dalam Pemilu, setelah menonton film, niat untuk berpartisipasi dalam pemilu terlihat lebih kuat di kalangan pemilih pemula. Mereka menyatakan kesediaan untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu berikutnya dan lebih yakin dalam membuat keputusan pemilihan. Diskusi tentang pemilu dengan teman dan keluarga juga mulai terjadi, yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap proses demokrasi.

Keterbatasan dalam aksi nyata, meskipun niat untuk berpartisipasi meningkat, tindakan nyata yang diambil oleh pemilih pemula masih terbatas. Banyak dari mereka yang

belum melanjutkan niat tersebut dengan langkah konkret, seperti mencari informasi lebih lanjut tentang calon yang akan dipilih atau terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait pemilu. Hambatan seperti kurangnya akses informasi, lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan ketidakpercayaan pada sistem politik menjadi faktor penghambat dalam mengubah niat menjadi tindakan.

Target yang ingin dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melaksanakan film *Kejarlah Janji* kemungkinan mencakup beberapa aspek berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Publik : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Film ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pemilu dan peran masyarakat dalam menentukan masa depan negara.
2. Edukasi Pemilih Memberikan edukasi kepada pemilih mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya memilih dengan bijak. Film ini dapat berfungsi sebagai alat edukasi yang menarik dan informatif.
3. Peningkatan Partisipasi Pemilih : Meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilu. Dengan memberikan informasi yang jelas dan menarik, KPU berharap dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suara mereka.
4. Peningkatan Citra dan Kredibilitas KPU : Membangun dan memperkuat citra positif KPU sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu. Melalui film ini, KPU ingin menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas dengan integritas dan akuntabilitas.
5. Menginspirasi Generasi Muda : Menarik minat generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses politik dan demokrasi. Film ini dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi anak muda untuk memahami pentingnya peran mereka dalam membangun masa depan negara.
6. Menyampaikan Pesan Demokrasi : Menyampaikan pesan-pesan tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan dalam konteks pemilu. Film ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7. Penggunaan Media Kreatif : Memanfaatkan media film sebagai alat komunikasi yang kreatif dan efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan pendekatan yang lebih menarik, diharapkan pesan-pesan KPU dapat tersampaikan dengan lebih baik.
8. Membangun Keterlibatan Masyarakat : Menciptakan ruang dialog dan keterlibatan masyarakat dalam diskusi mengenai pemilu dan demokrasi. Film ini dapat menjadi pemicu diskusi dan keterlibatan yang lebih aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Dengan mencapai target-target ini, KPU RI berharap dapat menciptakan pemilu yang lebih partisipatif, transparan, dan demokratis, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.

Kampanye humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melaksanakan film *Kejarlah Janji* bisa menghadapi beberapa kendala. Berikut adalah beberapa potensi kendala yang mungkin dihadapi:

1. Penerimaan Publik : Salah satu kendala utama adalah bagaimana film tersebut diterima oleh publik. Jika film tersebut tidak menarik minat audiens atau tidak mampu menyampaikan pesan dengan efektif, tujuan dari strategi humas bisa tidak tercapai.
2. Distribusi dan Penayangan: Kendala dalam mendistribusikan film ke berbagai platform atau saluran yang tepat juga dapat menjadi masalah. Keterbatasan akses ke media distribusi yang luas dapat menghambat jangkauan audiens yang diinginkan.
3. Biaya Produksi dan Promosi : Produksi film berkualitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, promosi untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap film juga membutuhkan anggaran yang cukup besar.
4. Komunikasi dan Koordinasi : Humas perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti produser, sutradara, aktor, dan media. Kendala dalam komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak ini bisa menghambat kelancaran proses produksi dan promosi film.
- 5 Keterbatasan Sumber Daya : Humas KPU mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam bidang produksi film dan pemasaran.
- 6 Perubahan Kebijakan dan Situasi Politik : Perubahan dalam kebijakan atau situasi politik dapat mempengaruhi strategi humas. Misalnya, perubahan aturan mengenai

kampanye politik atau situasi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerimaan film tersebut.

- 7 Kritik dan Kontroversi : Film yang berhubungan dengan isu-isu politik atau pemilu sering kali menjadi subjek kritik atau kontroversi. Ini bisa berdampak negatif pada citra KPU dan mengurangi efektivitas strategi humas.
- 8 Teknologi dan Aksesibilitas : Tantangan dalam memastikan film dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dengan akses teknologi yang terbatas.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan penyesuaian strategi sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam memberikan informasi pemilu bagi pemilih pemula mencakup berbagai strategi dan inisiatif untuk memastikan pemilih muda mendapatkan pemahaman yang baik tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan KPU RI:

1. Sosialisasi di Sekolah dan Kampus : KPU mengadakan program sosialisasi di sekolah-sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk menjelaskan proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.
2. Pelatihan dan Workshop : Mengadakan pelatihan dan workshop khusus untuk pemilih pemula yang mencakup topik-topik seperti cara memilih, mengenali calon, dan memahami platform politik.
3. Materi Edukasi Interaktif : KPU menyediakan berbagai materi edukasi yang interaktif seperti video, infografis, dan permainan edukatif yang dapat diakses secara online maupun offline. Materi ini dirancang agar mudah dipahami dan menarik bagi pemilih muda.
4. Kampanye di Media Sosial : Menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube untuk menyebarkan informasi pemilu dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi muda. KPU sering kali menggunakan konten visual dan multimedia untuk menarik perhatian pemilih pemula.

5. Website dan Aplikasi Mobile : KPU menyediakan informasi pemilu melalui website resmi dan aplikasi mobile yang mudah diakses oleh pemilih pemula. Informasi ini mencakup panduan memilih, profil calon, dan berita terkini tentang pemilu.
6. Kerja Sama dengan Influencer dan Public Figure : Menggandeng influencer dan tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya pemilu dan partisipasi aktif dalam demokrasi.
7. Event dan Kegiatan Khusus : Mengadakan berbagai event dan kegiatan khusus seperti seminar, diskusi publik, dan kompetisi yang melibatkan pemilih pemula. Event ini sering kali diadakan dalam format yang menarik seperti konser musik atau festival.
8. Konten Edukasi di Televisi dan Radio : Menyediakan konten edukasi tentang pemilu di stasiun televisi dan radio yang banyak diikuti oleh generasi muda, untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.
9. Simulasi Pemilu : Mengadakan simulasi pemilu di sekolah-sekolah atau komunitas untuk memberikan pengalaman langsung kepada pemilih pemula tentang bagaimana proses pemilihan berlangsung.
10. Materi Cetak : Menyediakan brosur, pamflet, dan poster yang berisi informasi penting tentang pemilu yang dapat dibagikan di sekolah, kampus, dan tempat-tempat umum lainnya.

Dengan berbagai upaya ini, KPU RI berusaha untuk memastikan bahwa pemilih pemula memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bijak dalam pemilu, serta memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.

Menyampaikan kesan dan pesan setelah menonton film *Kejarlah Janji* dapat memberikan gambaran tentang dampak film tersebut dan sejauh mana pesan yang ingin disampaikan oleh KPU RI berhasil diterima oleh penonton. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan acuan:

Kesan:

1. Inspiratif :

- a. Film ini berhasil memberikan inspirasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan peran setiap individu dalam proses demokrasi.

b. Karakter dan cerita dalam film menggugah emosi dan membuat penonton merasa *lebih terhubung dengan pesan yang disampaikan*.

2. Mendidik :

a. Film ini memberikan pengetahuan yang jelas tentang proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya memilih dengan bijak.

b. Informasi yang disajikan mudah dipahami, bahkan oleh pemilih pemula.

3. Visual dan Naratif Menarik :

a. Penggunaan visual yang menarik dan alur cerita yang baik membuat film ini tidak hanya informatif tetapi juga menghibur.

b. Penggunaan elemen dramatis dan karakter yang relatable membantu menarik perhatian penonton pemilih pemula.

4. Relevan :

Film ini berhasil menghubungkan isu-isu pemilu dengan kehidupan sehari-hari, membuatnya lebih relevan bagi penonton, terutama pemilih pemula.

Pesan:

1. Pentingnya Partisipasi Aktif :

a. Setiap suara sangat berarti dalam pemilu. Partisipasi aktif dari setiap warga negara diperlukan untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis.

b. Pemilu adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik dan menentukan masa depan negara.

2. Hak dan Kewajiban Pemilih :

a. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan juga kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab.

b. Memahami proses pemilu dan bagaimana memberikan suara dengan benar adalah tanggung jawab setiap pemilih.

3. Menghadapi Tantangan dan Hambatan :

a. Film ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan dan hambatan dalam proses pemilu, komitmen dan kerja sama dari semua pihak dapat mengatasi masalah tersebut.

b. Pesan tentang pentingnya ketahanan dan keberanian dalam menghadapi rintangan demi mencapai tujuan bersama.

4. Peran Generasi Muda :

- a. Generasi muda memiliki peran penting dalam proses demokrasi dan masa depan negara.
- b. Melalui partisipasi aktif dan pendidikan politik, generasi muda dapat membawa perubahan positif dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi.

5. Rekomendasi untuk Penonton:

- a. Diskusi dan Refleksi : Setelah menonton film, diadakan diskusi atau refleksi bersama untuk memperdalam pemahaman tentang pesan-pesan yang disampaikan dalam film.
- b. Penyebaran Informasi : Mengajak penonton untuk menyebarkan informasi yang didapat dari film kepada teman dan keluarga, sehingga semakin banyak